



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

# **MANAGEMENT RISIKO**

## **SEKRETARIAT DPRD**

TAHUN 2025



ບໍ່ຍິນິສູງກຸ່ມສາທາລະນາ

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**

ກຸ່ມສາທາລະນາບໍລິຫານຊຸມຊົນ

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

ຄະນະສູນທີ່ສາທາລະນາບໍລິຫານຊຸມຊົນ (໐໘໒໗) ຫຼັງຄະນະສູນພັດທະນາສູນພັດທະນາສູນພັດທະນາ

Jl. Melati No. 17 Denpasar, Telepon (0361) 237919, 237920 Fax 237921

**KATA PENGANTAR**

**Om Swastyastu,**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, atas Asung Kertha Wara NugrahaNya sehingga kami dapat menyelesaikan kertas kerja Pengelolaan Risiko pada Sekretariat DPRD Kota Denpasar periode 1 Januari sd. 31 Desember 2025. Kertas kerja ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para stakeholder, sebagai pertimbangan dalam pengelolaan risiko dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pengelolaan risiko dilakukan pada tingkat strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tingkat operasional, risiko fraud termasuk asistensi manajemen risiko dalam rangka MCP KPK. Kertas kerja ini memuat penetapan risiko strategis, penetapan risiko operasional dan fraud, proses analisis risiko, rencana kegiatan pengendalian risiko yang ada di Sekretariat DPRD Kota Denpasar.

Penyusunan kertas kerja ini telah memperhatikan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan kertas kerja ini. Selanjutnya, kami berharap agar kertas kerja ini dapat memberikan nilai tambah bagi perbaikan penyelenggaraan SPIP untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Kota Denpasar yang lebih baik.


**Om Shanti, Shanti, Shanti Om**

Denpasar, 23 Desember 2024  
Sekretaris DPRD Kota Denpasar



Ir. I. Gde Made Bhaju Pravita, MM  
Pembina Tk. I/ Gol IV b  
NIP. 196811141998031003

**Form 2.b**  
**Format Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD**

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kota Denpasar		
Penilaian Tahun	: Tahun 2025		
Periode yang Dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021 - 2026		
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		
OPD yang Dinilai	: Sekretariat DPRD Kota Denpasar		
Sumber Data	Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026		
Tujuan Strategis	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD		
Sasaran Strategis	Pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD		
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target
	1	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100%
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD		100%
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: 1. Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD		
	Sasaran Strategis: 1. Pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD		
	IKU Strategis: 1. Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan		
	Program: 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD		
<p>Denpasar, 23 Desember 2024</p> <p>Sekretariat DPRD Kota Denpasar</p>  <p><b><u>I. I Gde Made Bhaju Pravita, MM</u></b> NIP. 196811141998031003</p>			

**Form 2.c.1**  
**Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kota Denpasar		
Penilaian Tahun	: Tahun 2025		
Periode yang Dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021 - 2026		
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		
OPD yang Dinilai	: Sekretariat DPRD Kota Denpasar		
Sumber Data	Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026		
Tujuan Strategis	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD		
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan	100%
	2	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum	100%
	3	Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor	100%
	4	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%
	5	Persentase Fasilitasi Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%
	6	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD	100%
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan: Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan		
	Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan: Persentase Penatausahaan Administrasi Umum		
	Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan: Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor		
	Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		
	Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan: Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Keluaran/Hasil Kegiatan: Persentase Fasilitasi Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		
	Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan: Layanan Administrasi DPRD Keluaran/Hasil Kegiatan: Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD		
<p>Denpasar, 23 Desember 2024</p> <p>Sekretariat DPRD Kota Denpasar</p>  <p><b>Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM</b> NIP. 196811141998031003</p>			

**Form 2.c.2**  
**Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda : Pemerintah Daerah Kota Denpasar  
 Penilaian Tahun : Tahun 2025  
 Periode yang Dinilai : Periode RPJMD Tahun 2021 - 2026  
 Urusan Pemerintahan : Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan  
 OPD yang Dinilai : Sekretariat DPRD Kota Denpasar

Sumber Data : Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026

Tujuan Strategis : Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD

Program : Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
		1	Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
	2	Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%
	3	Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	100%
	4	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	100%
	5	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%
	6	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%
	7	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	100%

Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko

Program: Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD  
 Kegiatan: Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD  
 Keluaran/Hasil Kegiatan: Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Program: Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD  
 Kegiatan: Pembahasan Kebijakan Anggaran  
 Keluaran/Hasil Kegiatan: Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran

Program: Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD  
 Kegiatan: Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan  
 Keluaran/Hasil Kegiatan: Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Program: Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD  
 Kegiatan: Peningkatan Kapasitas DPRD  
 Keluaran/Hasil Kegiatan: Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD

Program: Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD  
 Kegiatan: Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat  
 Keluaran/Hasil Kegiatan: Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Program: Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD  
 Kegiatan: Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD  
 Keluaran/Hasil Kegiatan: Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Program: Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD  
 Kegiatan: Fasilitasi Tugas DPRD  
 Keluaran/Hasil Kegiatan: Persentase Fasilitasi Tugas DPRD

Denpasar, 23 Desember 2024  
 Sekretariat DPRD Kota Denpasar



**Ir. I. Gde Made Bhaju Pravita, MM**  
 NIP. 196811141998031003

**Form 3.b**  
**Identifikasi Risiko Strategis OPD**

Nama Pemda : Pemerintah Daerah Kota Denpasar  
 Nama OPD : Sekretariat DPRD Kota Denpasar  
 Tahun Penilaian : Tahun 2025  
 Periode yang dinilai : Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026  
 Tujuan Strategis : Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD  
 Urusan Pemerintahan : Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Risiko				Sebab			Dampak	
		Identifikasi Kinerja	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan : Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD									
	Sasaran : Pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD									
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	1 Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan  2 Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD	Tidak tercapainya target nilai survei kepuasan pelayanan dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	RSO.25.34.03.01	Sekretaris DPRD	1. Responden kurang mendapatkan pelayanan yang optimal 2. Kinerja Petugas Pelayanan kurang optimal	Internal	C	Proses kerja menjadi terhambat dan kurang efektif dalam memfasilitasi kegiatan	Sekretariat DPRD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan DPRD	RSO.25.34.03.02	Sekretaris DPRD	1. Proses administrasi tidak sesuai prosedur 2. Kurangnya keterampilan atau pemahaman staf mengenai prosedur 3. Pemenuhan sarana dan prasarana yang belum memadai 4. Pelaksanaan penguatan internalisasi masing-masing unit kerja / dialog kinerja tidak dilaksanakan secara berkala	Internal	C	Proses kerja menjadi terhambat dan kurang efektif dalam memfasilitasi kegiatan	Sekretariat DPRD

Denpasar, 23 Desember 2024  
 Sekretariat DPRD Kota Denpasar

  
**Dr. I Gde Made Bhaju Pravita, MM**  
 NIP. 196811141998031003

Form 3.c  
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Pemerintah Daerah Kota Denpasar  
 Nama OPD : Sekretariat DPRD Kota Denpasar  
 Tahun Penilaian : Tahun 2025  
 Periode yang dinilai : Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026  
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Pelayanan Kesekretariatan DPRD  
 Sasaran Strategis OPD : Pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD  
 Urusan Pemerintahan : Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap	Uraian	Risiko	Pemilik	Sebab		C/UC	Dampak	
					Kode Risiko		Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD										
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Pelaksanaan	Tidak tercapainya target nilai Survei Kepuasan Pelayanan "Pelayanan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah"	ROO.25.34.03.01	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Rendahnya perolehan nilai salah satu unsur komponen "Kompetensi Prilaku" karena kurangnya keterampilan atau pemahaman staf mengenai prosedur fasilitasi kegiatan tersebut	Internal	C	Proses kerja menjadi terhambat dan kurang efektif dalam memfasilitasi kegiatan	Sekretariat DPRD
			Perencanaan	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat berpotensi terjadinya perbuatan curang	RF.25.34.03.01	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Penyusunan anggaran tidak berdasarkan data yang lengkap atau akurat	Internal	C	Pelaksanaan pengelolaan anggaran berpotensi tidak tepat sasaran	Sekretariat DPRD
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.34.03.02	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Belum optimalnya pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan	Internal	C	Adanya potensi kerugian keuangan daerah	Sekretariat DPRD
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pelaksanaan	Tidak tercapainya target nilai Survei Kepuasan Pelayanan "Pelayanan Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS serta KUA dan PPAS Perubahan", "Pelayanan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan APBD Perubahan", "Pelayanan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD"	ROO.25.34.03.02	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Rendahnya perolehan nilai salah satu unsur komponen "Kompetensi Prilaku" karena kurangnya keterampilan atau pemahaman staf mengenai prosedur fasilitasi kegiatan tersebut	Internal	C	Proses kerja menjadi terhambat dan kurang efektif dalam memfasilitasi kegiatan	Sekretariat DPRD
			Perencanaan	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.25.34.03.03	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Penyusunan anggaran tidak berdasarkan data yang lengkap atau akurat	Internal	C	Pelaksanaan pengelolaan anggaran berpotensi tidak tepat sasaran	Sekretariat DPRD
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.34.03.04	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Belum optimalnya pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan	Internal	C	Adanya potensi kerugian keuangan daerah	Sekretariat DPRD
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Pelaksanaan	Tidak tercapainya target nilai Survei Kepuasan Pelayanan "Pelayanan Fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD", "Pelayanan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah"	ROO.25.34.03.03	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Rendahnya perolehan nilai salah satu unsur komponen "Kompetensi Prilaku" karena kurangnya keterampilan atau pemahaman staf mengenai prosedur fasilitasi kegiatan tersebut	Internal	C	Proses kerja menjadi terhambat dan kurang efektif dalam memfasilitasi kegiatan	Sekretariat DPRD
			Perencanaan	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.25.34.03.05	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Penyusunan anggaran tidak berdasarkan data yang lengkap atau akurat	Internal	C	Pelaksanaan pengelolaan anggaran berpotensi tidak tepat sasaran	Sekretariat DPRD

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab			Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	CU/C	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.34.03.06	Kabag Fasilitas dan Pengawasan	Belum optimalnya pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan	Internal	C	Adanya potensi kerugian keuangan daerah	Sekretariat DPRD
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	Pelaksanaan	Terdapat kesalahan prosedur dalam memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD	ROO.25.34.03.04	Kabag Umum dan Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Terbatasnya undangan pelatihan terkait prosedur fasilitasi bagi staf sehingga kurangnya informasi / pemahaman tentang prosedur dan perubahan kebijakan terkait.	Internal	C	Proses kerja menjadi terhambat dan kurang efektif dalam memfasilitasi kegiatan	Sekretariat DPRD
			Perencanaan	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.25.34.03.07	Kabag Umum dan Keuangan dan Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Penyusunan anggaran tidak berdasarkan data yang lengkap atau akurat	Internal	C	Pelaksanaan pengelolaan anggaran berpotensi tidak tepat sasaran	Sekretariat DPRD
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.34.03.08	Kabag Umum dan Keuangan dan Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Belum optimalnya pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan	Internal	C	Adanya potensi kerugian keuangan daerah	Sekretariat DPRD
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Pelaksanaan	Tidak tercapainya target nilai Survei Kepuasan Pelayanan "Pelayanan Pelaksanaan Reses"	ROO.25.34.03.05	Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Rendahnya perolehan nilai salah satu unsur komponen "Kompetensi Prilaku" karena kurangnya keterampilan atau pemahaman staf mengenai prosedur fasilitasi kegiatan tersebut	Internal	C	Proses kerja menjadi terhambat dan kurang efektif dalam memfasilitasi kegiatan	Sekretariat DPRD
			Pelaksanaan Pokok Pikiran	Terjadi benturan kepentingan oleh pihak/keompok tertentu untuk memaksakan usulan pokok pikiran DPRD yang tidak sesuai dengan prioritas daerah	RF.25.34.03.09	Kabag Fasilitas dan Pengawasan	Belum cermatnya SDM yang bertugas memfasilitasi penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD	Internal	C	1. Berpotensi menghambat penyusunan dokumen perencanaan daerah 2. Berpotensi terjadi gratifikasi karena adanya benturan kepentingan	Sekretariat DPRD
			Perencanaan	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.25.34.03.10	Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Penyusunan anggaran tidak berdasarkan data yang lengkap atau akurat	Internal	C	Pelaksanaan pengelolaan anggaran berpotensi tidak tepat sasaran	Sekretariat DPRD
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.34.03.11	Kabag Fasilitas dan Pengawasan	Belum optimalnya pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan	Internal	C	Adanya potensi kerugian keuangan daerah	Sekretariat DPRD
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Fasilitas Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Pelaksanaan	Tidak tercapainya target kinerja fasilitasi kegiatan tersebut	ROO.25.34.03.06	Kabag Fasilitas dan Pengawasan	Tidak adanya pelanggaran kode etik DPRD	Eksternal	UC	Kegiatan berpotensi tidak dilaksanakan	Sekretariat DPRD
			Perencanaan	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.25.34.03.12	Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Penyusunan anggaran tidak berdasarkan data yang lengkap atau akurat	Internal	C	Pelaksanaan pengelolaan anggaran berpotensi tidak tepat sasaran	Sekretariat DPRD
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.34.03.13	Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Belum optimalnya pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan	Internal	C	Adanya potensi kerugian keuangan daerah	Sekretariat DPRD
	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitas Tugas DPRD	Pelaksanaan	Tidak tercapainya target kinerja fasilitasi kegiatan tersebut	ROO.25.34.03.07	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Terbatasnya undangan pelatihan terkait prosedur fasilitasi bagi staf sehingga kurangnya informasi / pemahaman tentang prosedur dan perubahan kebijakan terkait	Internal	C	Proses kerja menjadi terhambat dan kurang efektif dalam memfasilitasi kegiatan	Sekretariat DPRD
			Perencanaan	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.25.34.03.14	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Penyusunan anggaran tidak berdasarkan data yang lengkap atau akurat	Internal	C	Pelaksanaan pengelolaan anggaran berpotensi tidak tepat sasaran	Sekretariat DPRD

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab			C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
					f							g
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.34.03.15	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Belum optimalnya pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan	Internal	C	Adanya potensi kerugian keuangan daerah	Sekretariat DPRD	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota											
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan	Pelaksanaan	Kekurangan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	ROO.25.34.03.08	Kabag Umum dan Keuangan	Kurang tepatnya perhitungan anggaran gaji dan tunjangan ASN	Internal	C	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN tidak tepat waktu	Sekretariat DPRD	
			Perencanaan	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.25.34.03.16	Kabag Umum dan Keuangan	Penyusunan anggaran tidak berdasarkan data yang lengkap atau akurat	Internal	C	Pelaksanaan pengelolaan anggaran berpotensi tidak tepat sasaran	Sekretariat DPRD	
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.34.03.17	Kabag Umum dan Keuangan	Belum optimalnya pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan	Internal	C	Adanya potensi kerugian keuangan daerah	Sekretariat DPRD	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum	Pelaksanaan	Tidak tercapainya target nilai Survei Kepuasan Pelayanan "Pelayanan Penerimaan Tamu Kunjungan Kerja"	ROO.25.34.03.09	Kabag Umum dan Keuangan dan Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Rendahnya perolehan nilai unsur komponen "Kompetensi Prilaku" karena kurangnya keterampilan atau pemahaman staf mengenai prosedur fasilitas kegiatan tersebut. Serta unsur "Sarana dan Prasarana" yang belum memadai	Internal	C	Proses kerja menjadi terhambat dan kurang efektif dalam memfasilitasi kegiatan	Sekretariat DPRD	
			Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terjadinya pemecahan pengadaan barang dan jasa karena adanya benturan kepentingan	RF.25.34.03.18	Kabag Umum dan Keuangan dan Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	1. Adanya intervensi dari pihak / kelompok tertentu pada tahap pemilihan calon penyedia 2. Pemecahan pengadaan barang dan jasa dalam rangka penghindaran pemotongan pajak	Internal	C	Berpotensi terjadi penyuaian yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara	Sekretariat DPRD	
			Pengadaan Barang dan Jasa melalui E-Purchasing	Terbatasnya ketersediaan calon penyedia pada katalog elektronik sehingga kurang mendukung pelaksanaan persaingan sehat	RF.25.34.03.19	Kabag Umum dan Keuangan dan Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	1. Belum optimalnya pelaku usaha lokal atau umkm mengetahui atau memahami prosedur pengadaan menggunakan epurchasing 2. Penyedia UMKM merasa kesulitan karena bersaing dengan penyedia besar yang sudah mapan di katalog elektronik	Eksternal	UC	Berpotensi timbulnya gratifikasi pada tahap pemilihan calon penyedia dan terjadi markup harga akibat belum optimalnya menyusun referensi harga dari keterbatasan pelaku usaha di katalog elektronik	Sekretariat DPRD	
			Perencanaan	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.25.34.03.20	Kabag Umum dan Keuangan dan Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Penyusunan anggaran tidak berdasarkan data yang lengkap atau akurat	Internal	C	Pelaksanaan pengelolaan anggaran berpotensi tidak tepat sasaran	Sekretariat DPRD	
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.34.03.21	Kabag Umum dan Keuangan dan Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Belum optimalnya pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan	Internal	C	Adanya potensi kerugian keuangan daerah	Sekretariat DPRD	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor	Pelaksanaan	Tidak terpenuhinya kebutuhan penyediaan jasa penunjang kantor	ROO.25.34.03.10	Kabag Umum dan Keuangan	1. Kurangnya keterampilan atau pemahaman staf mengenai perubahan kebijakan 2. Daftar pembayaran jasa penunjang kantor tidak diselesaikan tepat waktu	Internal	C	Proses kerja menjadi terhambat dan kurang efektif dalam memfasilitasi kegiatan	Sekretariat DPRD	
			Perencanaan	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.25.34.03.22	Kabag Umum dan Keuangan	Penyusunan anggaran tidak berdasarkan data yang lengkap atau akurat	Internal	C	Pelaksanaan pengelolaan anggaran berpotensi tidak tepat sasaran	Sekretariat DPRD	
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.34.03.23	Kabag Umum dan Keuangan	Belum optimalnya pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan	Internal	C	Adanya potensi kerugian keuangan daerah	Sekretariat DPRD	

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab				Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pelaksanaan	Tidak tercapainya target kinerja pemeliharaan BMD	ROO.25.34.03.11	Kabag Umum dan Keuangan	1. Pelaksanaan jadwal pemeliharaan yang tidak konsisten 2. Keterbatasan staf yang bertugas melakukan inventarisasi permasalahan BMD sehingga BMD tidak dipelihara secara rutin	Internal	C	Biaya pemeliharaan menjadi lebih tinggi dari yang diperkirakan berpotensi pemborosan anggaran	Sekretariat DPRD
			Perencanaan	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.25.34.03.24	Kabag Umum dan Keuangan	Penyusunan anggaran tidak berdasarkan data yang lengkap atau akurat	Internal	C	Pelaksanaan pengelolaan anggaran berpotensi tidak tepat sasaran	Sekretariat DPRD
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.34.03.25	Kabag Umum dan Keuangan	Belum optimalnya pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan	Internal	C	Adanya potensi kerugian keuangan daerah	Sekretariat DPRD
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitasi Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Pelaksanaan	Belum optimalnya pelaksanaan fasilitasi penyediaan hak keuangan DPRD	ROO.25.34.03.12	Kabag Umum dan Keuangan	Kurangnya keterampilan atau pemahaman staf mengenai prosedur fasilitasi kegiatan tersebut	Internal	C	Penyediaan hak keuangan DPRD berpotensi tidak sesuai ketentuan	Sekretariat DPRD
			Perencanaan	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.25.34.03.26	Kabag Umum dan Keuangan	Penyusunan anggaran tidak berdasarkan data yang lengkap atau akurat	Internal	C	Pelaksanaan pengelolaan anggaran berpotensi tidak tepat sasaran	Sekretariat DPRD
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.34.03.27	Kabag Umum dan Keuangan	Belum optimalnya pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan	Internal	C	Adanya potensi kerugian keuangan daerah	Sekretariat DPRD
	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD	Pelaksanaan	Tidak tercapainya target kinerja fasilitasi kegiatan tersebut	ROO.25.34.03.13	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	1. Terbatasnya undangan pelatihan terkait prosedur fasilitasi bagi staf sehingga kurangnya informasi / pemahaman tentang prosedur dan perubahan kebijakan terkait. 2. Sulitnya memprediksi agenda DPRD untuk dapat difasilitasi kebutuhannya	Internal	C	Proses kerja menjadi terhambat dan kurang efektif dalam memfasilitasi kegiatan	Sekretariat DPRD
			Perencanaan	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.25.34.03.28	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Penyusunan anggaran tidak berdasarkan data yang lengkap atau akurat	Internal	C	Pelaksanaan pengelolaan anggaran berpotensi tidak tepat sasaran	Sekretariat DPRD
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.34.03.29	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Belum optimalnya pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan	Internal	C	Adanya potensi kerugian keuangan daerah	Sekretariat DPRD

Denpasar, 23 Desember 2024  
 Sekretaris DPRD Kota Denpasar

**Ir. Gde Made Bhaju Pravita, MM**  
 MIP. 196811141998031003



**FORM 4**  
**Hasil Analisis Risiko**

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar  
 Tahun Penilaian : Tahun 2025  
 Tujuan Strategis : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan  
 Urusan Pemerintahan : Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

**Analisis Risiko**

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis Pemda	NIHIL			
II	Risiko Strategis OPD :				
1	Tidak tercapainya target nilai survei kepuasan pelayanan dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	RSO.25.34.03.01	1	2	2
2	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan DPRD	RSO.25.34.03.02	1	2	2
III	Risiko Operasional OPD :				
1	Tidak tercapainya target nilai Survei Kepuasan Pelayanan "Pelayanan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah"	ROO.25.34.03.01	1	2	2
2	Tidak tercapainya target nilai Survei Kepuasan Pelayanan "Pelayanan Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS serta KUA dan PPAS Perubahan", "Pelayanan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan APBD Perubahan", "Pelayanan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD"	ROO.25.34.03.02	1	2	2
3	Tidak tercapainya target nilai Survei Kepuasan Pelayanan "Pelayanan Fasilitas Fungsi Pengawasan DPRD", "Pelayanan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah"	ROO.25.34.03.03	1	2	2
4	Terdapat kesalahan prosedur dalam memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD	ROO.25.34.03.04	1	2	2
5	Tidak tercapainya target nilai Survei Kepuasan Pelayanan "Pelayanan Pelaksanaan Reses"	ROO.25.34.03.05	1	2	2
6	Tidak tercapainya target kinerja fasilitasi kegiatan tersebut	ROO.25.34.03.06	1	2	2
7	Tidak tercapainya target kinerja fasilitasi kegiatan tersebut	ROO.25.34.03.07	1	2	2
8	Kekurangan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	ROO.25.34.03.08	2	1	2
9	Tidak tercapainya target nilai Survei Kepuasan Pelayanan "Pelayanan Penerimaan Tamu Kunjungan Kerja"	ROO.25.34.03.09	1	2	2

10	Tidak terpenuhinya kebutuhan penyediaan jasa penunjang kantor	ROO.25.34.03.10	1	2	2
11	Tidak tercapainya target kinerja pemeliharaan BMD	ROO.25.34.03.11	1	2	2
12	Belum optimalnya pelaksanaan fasilitasi penyediaan hak keuangan DPRD	ROO.25.34.03.12	2	1	2
13	Tidak tercapainya target kinerja fasilitasi kegiatan tersebut	ROO.25.34.03.13	1	2	2
IV	Risiko Fraud OPD				
1	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat berpotensi terjadinya perbuatan curang	RF.25.34.03.01	2	1	2
2	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.34.03.02	2	1	2
3	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.25.34.03.03	2	1	2
4	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.34.03.04	2	1	2
5	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.25.34.03.05	2	1	2
6	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.34.03.06	2	1	2
7	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.25.34.03.07	2	1	2
8	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.34.03.08	2	1	2
9	Terjadi benturan kepentingan oleh pihak/kelompok tertentu untuk memaksakan usulan pokok pikiran DPRD yang tidak sesuai dengan prioritas daerah	RF.25.34.03.09	1	2	2
10	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.25.34.03.10	2	1	2
11	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.34.03.11	2	1	2
12	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.25.34.03.12	2	1	2
13	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.34.03.13	2	1	2
14	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.25.34.03.14	2	1	2
15	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.34.03.15	2	1	2
16	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.25.34.03.16	2	1	2

17	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.34.03.17	2	1	2
18	Terjadinya pemecahan pengadaan barang dan jasa karena adanya benturan kepentingan	RF.25.34.03.18	1	2	2
19	Terbatasnya ketersediaan calon penyedia pada katalog elektronik sehingga kurang mendukung pelaksanaan persaingan sehat	RF.25.34.03.19	1	2	2
20	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.25.34.03.20	2	1	2
21	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.34.03.21	2	1	2
22	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.25.34.03.22	2	1	2
23	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.34.03.23	2	1	2
24	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.25.34.03.24	2	1	2
25	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.34.03.25	2	1	2
26	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.25.34.03.26	2	1	2
27	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.34.03.27	2	1	2
28	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.25.34.03.28	2	1	2
29	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.34.03.29	2	1	2

Denpasar, 23 Desember 2024  
Sekretariat DPRD Kota Denpasar



**Ir. Gde Made Bhaju Pravita, MM**  
NIP. 196811141998031003

**Form 5**  
**Daftar Risiko Prioritas PEMDA**

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar  
Tahun Penilaian : Tahun 2025  
Tujuan Strategis : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan  
Urusan Pemerintahan : Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	Renstra	d	e	f	g

NIHIL

Denpasar, 23 Desember 2024  
Sekretariat DPRD Kota Denpasar

  
**Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM**  
NIP. 196811141998031003

**Form 7**  
**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan PEMDA**  
**(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko) PEMDA**

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar  
 Tahun Penilaian : Tahun 2025  
 Tujuan Strategis : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan  
 Urusan Pemerintahan : Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h

NIHIL



Denpasar, 23 Desember 2024  
 Sekretariat DPRD Kota Denpasar

**K. E. Gde Made Bhaju Pravita, MM**  
 NIP. 196811141998031003

## Form 8

## RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DI BANGUN PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar
Tahun Penilaian	: Tahun 2025
Tujuan Strategis	: Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No	Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h

NIHIL

Denpasar, 23 Desember 2024  
Sekretariat DPRD Kota Denpasar



**Ir. Gde Made Bhaju Pravita, MM**  
NIP. 196811141998031003

Form 9

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN PEMDA

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar  
 Tahun Penilaian : Tahun 2025  
 Tujuan Strategis : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan  
 Urusan Pemerintahan : Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No	Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g

NIHIL

Denpasar, 23 Desember 2024  
 Sekretariat DPRD Kota Denpasar



In I Gde Made Bhaju Pravita, MM  
 NIP. 196811141998031003

**PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP**

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar  
 Tahun Penilaian : Tahun 2025  
 Tujuan Strategis : Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD  
 Urusan Pemerintahan : Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko		Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab Dampak					
<b>I Risiko Strategis Pemda</b>									
<b>II Risiko Strategis OPD</b>									
1	Tidak tercapainya target nilai survei kepuasan pelayanan dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	RSO.25.34.03.01							
2	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan DPRD	RSO.25.34.03.02							
<b>III Risiko Operasional OPD</b>									
1	Tidak tercapainya target nilai Survei Kepuasan Pelayanan "Pelayanan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah"	ROO.25.34.03.01							
2	Tidak tercapainya target nilai Survei Kepuasan Pelayanan "Pelayanan Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS serta KUA dan PPAS Perubahan", "Pelayanan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan APBD Perubahan", "Pelayanan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD"	ROO.25.34.03.02							
3	Tidak tercapainya target nilai Survei Kepuasan Pelayanan "Pelayanan Fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD", "Pelayanan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah"	ROO.25.34.03.03							

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
4	Terdapat kesalahan prosedur dalam memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD	ROO.25.34.03.04								
5	Tidak tercapainya target nilai Survei Kepuasan Pelayanan "Pelayanan Pelaksanaan Reses"	ROO.25.34.03.05								
6	Tidak tercapainya target kinerja fasilitasi kegiatan tersebut	ROO.25.34.03.06								
7	Tidak tercapainya target kinerja fasilitasi kegiatan tersebut	ROO.25.34.03.07								
8	Kekurangan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	ROO.25.34.03.08								
9	Tidak tercapainya target nilai Survei Kepuasan Pelayanan "Pelayanan Penerimaan Tamu Kunjungan Keria"	ROO.25.34.03.09								
10	Tidak terpenuhinya kebutuhan penyediaan jasa penunjang kantor	ROO.25.34.03.10								
11	Tidak tercapainya target kinerja pemeliharaan BMD	ROO.25.34.03.11								
12	Belum optimalnya pelaksanaan fasilitasi penyediaan hak keuangan DPRD	ROO.25.34.03.12								
13	Tidak tercapainya target kinerja fasilitasi kegiatan tersebut	ROO.25.34.03.13								
<b>IV Risiko Fraud OPD</b>										
1	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat berpotensi terjadinya perbuatan curang	RF.25.34.03.01								
2	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.34.03.02								
3	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.25.34.03.03								

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
4	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.34.03.04								
5	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.25.34.03.05								
6	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.34.03.06								
7	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.25.34.03.07								
8	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.34.03.08								
9	Terjadi benturan kepentingan oleh pihak/kelompok tertentu untuk memaksakan usulan pokok pikiran DPRD yang tidak sesuai dengan prioritas daerah	RF.25.34.03.09								
10	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.25.34.03.10								
11	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.34.03.11								
12	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.25.34.03.12								
13	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.34.03.13								
14	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.25.34.03.14								

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
15	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.34.03.15								
16	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.25.34.03.16								
17	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.34.03.17								
18	Terjadinya pemecahan pengadaan barang dan jasa karena adanya benturan kepentingan	RF.25.34.03.18								
19	Terbatasnya ketersediaan calon penyedia pada katalog elektronik sehingga kurang mendukung pelaksanaan persaingan sehat	RF.25.34.03.19								
20	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.25.34.03.20								
21	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.34.03.21								
22	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.25.34.03.22								
23	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.34.03.23								
24	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.25.34.03.24								

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
25	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.34.03.25								
26	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.25.34.03.26								
27	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.34.03.27								
28	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.25.34.03.28								
29	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.34.03.29								

Denpasar, 23 Desember 2024  
 Sekretaris DPRD Kota Denpasar



**fr. I Gde Made Bhaju Pravita, MM**  
 NIP. 196811141998031003